

BAB II

WILAYAH AL-HISBAH DAN KEUANGAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Wilayah al-hisbah

1. Pengertian dan dasar hukum wilayah al-hisbah

Secara etimologi al-hisbah merupakan kata benda yang berasal dari kata al-ihtisab, artinya “menahan upah”, kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminology, al-mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran.”²⁶

Ulama fiqh siyasah mendefinisikan hisbah adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.²⁷ Sedangkan lembaga hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.

Wilayah al-hisbah sebagaimana allah swt berfirman dalam surah al-imran: 104 sebagai berikut:

وَل تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran:104).²⁸

²⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.125.

²⁷ Azyumardi Azra, *Eksiklopedia Islam Jilid 3*, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h.33

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

Pada dasarnya hisbah merupakan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan ayat al-qur'an diatas, kemudian didukung sabda nabi Muhammad saw:

Artinya: dari Abi said al-khudri r.a berkata: saya menedengar rasulullah saw bersabda: barang siapa diantara kamun yang melihat kemungkaran, hendaklah berusaha mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu merubah dengan tangan hendaklah mengubah dengan lisannyaa dan apabila dengan lisanpun tidak mampu maka hendaklah mengubah dengan hatinya. (HR. Muslim).²⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, mencegah kemungkaran termasuk cabang dari iman, sedang iman bisa bertambah sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam melaksanakan perintah syari'at. Semakin banyak seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka semakin bertambah kuat iman mereka, begitu juga sebaliknya, semakin banyak melakukan yang dilarang oleh syari'at maka semakin lemah juga iman mereka. Maka agar tidak semakin rapuh iman kita, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar.³⁰

Perintah diatas meliputi berbagai macam permasalahan, diantaranya kewajiban pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, dan menyeru untuk berbuat kebaikan dan melarang hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi umat serta melarang perbuatan munkar. Agar dapat membawa perjalanan roda pemerintahan pada arah yang baik.³¹

2. Sejarah Perkembangan Wilayah Al-Hisbah

Wilayah al-hisbah telah dikenal dan berlangsung sejak zaman rasulullah saw, yang dalam keseharian rasulullah tidak pernah lepas dari menyeru kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf secara harfiah berarti sesuatu yang dikenal oleh

²⁹ Al-imam Abu Zakariya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Riyadusshalihin*, (Al-Haramain, 2005) h.102.

³⁰ Departemen Agama, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda utama, 1993), h.117.

³¹ *Ibid*, h. 54

ucapannya, tindakan, atau tekad yang dianggap baik dan diperintahkan untuk dilakukan sesuai dengan syari'at. Sedangkan munkar adalah segala ucapan, tindakan, atau tekad yang dianggap tidak baik dan dilarang oleh syari'at untuk dilakukan.³²

Munculnya wilayah al-hisbah sebenarnya diilhami dari suatu riwayat yang menyatakan bahwa rasulullah menemukan sesuatu yang ganjil pada makanan yang mengandung aib tersembunyi. Ketika nabi Muhammad saw melewati setumpukan biji gandum, dan tangan nabi Muhammad saw menyentuh sampai biji gandum yang masih basah. Nabi Muhammad saw menanyakan pada pedagang gandum, kenapa gandum ini basah, pedagang tersebut menjawab karena kehujanan. Karena ternyata gandum tersebut kehujanan, kemudian nabi Muhammad saw menyuruh untuk meletakkan diatas pagar para pembeli mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, nabi Muhammad saw berkata “Barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami”.³³

Tradisi hisbah tetap berlanjut setelah nabi Muhammad saw wafat, dilanjutkan oleh sahabat Umar. Umar sangat tegas dalam melaksanakan hisbah, sehingga pernah memerintahkan membakar rumah seorang warga karena tertangkap menjual minuman keras. Pada masa Umar muncul peraturan-peraturan resmi yang berkaitan dengan hisbah. Namun istilah wilayah al-hisbah baru dikenal pada masa al-mahdi bin al-abbas (158-169 H), dan menjadi lembaga resmi pada masa pasca pemerintahan sahabat-sahabat nabi Muhammad saw.³⁴

3. Tugas dan wewenang wilayah al-hisbah

Adapun tugas wilayah al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan hak-haknya tanpa bantuan petugas-petugas hisbah. Ibnu khaldun mengungkapkan secara rinci bahwa hisbah adalah

³² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h.277.

³³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h.127.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi urusan keagamaan, kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin yang dipandang mempunyai keahlian.³⁵

Pejabat dalam wilah al-hisbah disebut dengan al-muhtasib, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.³⁶ Pada zaman nabi Muhammad saw dan sahabat petugas tersebut ditunjuk oleh khalifah untuk mengawasi pasar dan para pedagang agar tidak terjadi kecurangan.

Tugas seorang muhtasib tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa dan ketika mendengar pengaduan saja, namun dia juga berhak memberi putusan yang termasuk pada bidangnya. Hal ini dilakukan apabila ada suatu sengketa yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika sengketa tersebut melalui proses pengadilan akan memakan waktu yang lebih lama. Akan tetapi muhtasib tidak berhak mendengarkan keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak berhak menyuruh berrsumpah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal tersebut adalah wewenang hakim pengadilan.³⁷ Wilayah hisbah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, pelaksana undang-undang dan mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.

Pada prinsipnya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bisa berbentuk perorangan atau bersifat sukarela, serta dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk pemerintah. Orang yang sukarela melakukan tugas secara sukarela lebih dikenal dengan mutatawwi', sedangkan muhtasib lembaga yang ditunjuk

³⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.24.

³⁶ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), h.168.

³⁷ Basiq djalil, *peradilan Islam*, h.129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh pemerintah. Ada beberapa perbedaan antara muhtasib dan mutatawwi', sebagaimana yang dikemukakan oleh al-mawardi, diantaranya:³⁸

Muhtasib wajib menyelesaikan urusan hisbah dengan segera, sedangkan mutatawwi' tidak demikian. Muhtasib wajib mencari dan menyelesaikan kemungkaran yang secara jelas dilakukan agar dapat ditiadakan, dan mencari ma'ruf yang ditinggalkan agar dapat dilaksanakan, sedangkan bagi mutatawwi' buka suatu kewajiban. Muhtasib merupakan aparat resmi pemerintah dan mendapat gaji dari bait al-mal, sedangkan mutatawwi' tidak demikian.

Adapun tugas muhtasib adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan wewenang para penyelenggara negara dan para hakim, serta anggota dewan lainnya. Namun muhtasib dapat melakukan penuntutan terhadap perkara yang menyimpang yang diketahuinya kepada lembaga peradilan. Mengenai penjabaran dari tugas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam:³⁹

Tanggung jawab terkait dengan hak kepada Allah swt, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktifitas keagamaan mereka. Tanggung jawab terkait dengan hak-hak manusia, yaitu menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan, terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tanggung jawab terkait dengan hak Allah swt dan masyarakat, yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum, seperti memelihara jembatan.

Wilayah al-hisbah di samping bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah al-hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Hukuman tersebut berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara',

³⁸ Oyo sunaryo mukhlis, perkembangan peradilan Islam, h. 25.

³⁹ Imam al-mawardi, al-ahkam al-sulthaniyah, h. 403-411.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (al-muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh al-muhtasib, langkah-langkah ini dapat berupa saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al-muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁴⁰

Seiring perkembangannya, wilayah al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-mawardi, kewenangan wilayah al-hisbah ini tertuju kepada tiga hal: pertama, dakwaan terkait dengan kecurangan dan pengurangan timbangan atau takaran, kedua: dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran atau timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan terkait dengan penundaan pembayaran hutang, padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya hutangnya.

Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, seorang muhtasib harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun syarat tersebut adalah:⁴¹ mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar; mengetahui hukum-hukum syara' (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang). Dan di dalam buku ensiklopedia Islam disebutkan tentang syarat-syarat sebagai muhtasib, diantaranya:⁴²

- a. Merdeka, aqil baliqh dan adil;
- b. Memiliki pandangan yang luas serta berpegang teguh kepada ajaran islam;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bentuk kemungkaran.

⁴⁰ Ibnu taimiyah, tugas negara menurut islam, h.14

⁴¹ Basiq djalil, peradilan islam, h.129-130

⁴² Azyumardi azra, ensiklopedia islam, h.33.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelembagaan dan perkembangan wilayah al-hisbah sejalan dengan berkembangnya Islam berbagai penjuru dunia, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Sejak zaman rasulullah saw lembaga hisbah menjadi institusi keagamaan yang mempunyai bermacam-macam tugas, baik berkaitan dengan hak-hak Allah swt maupun hubungan manusia dengan Allah swt. Mulai dari tugas menangani perkara ringan dalam perdagangan sampai dengan memutuskan perkara dalam bidangnya apabila perkara tersebut harus segera diselesaikan.

Pada masa bani umayyah jabatan administrative lembaga hisbah adalah jabatan sebagai inspektur pasar yang disebut juga sebagai 'amil al-suq (menteri pasar), kekuasaannya terbatas pada soal timbangan, takaran, dan ukuran yang digunakan di pasar-pasar serta perkara kecil lainnya. Peran lembaga hisbah berkembang sangat luas, mengawasi perbuatan yang melanggar hukum seperti perjudian, penjualan minuman keras, serta mengatur jalannya kelancaran lalu lintas, yang pada saat ini bisa disamakan dengan tugas kepolisian.⁴³

Wilayah al-hisbah yang ditetapkan oleh hukum Islam secara garis besar menyerupai lembaga kejaksaan, sedangkan muhtasib dapat disamakan dengan jaksa, karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum serta tata tertib masyarakat.⁴⁴

B. Keuangan Negara dalam Islam

1. Bait al-Mal

Bait al-Mal berasal dari kata bait yang berarti rumah dan mal yang berarti harta. Secara terminology, Bait al-Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi bait al-mal merupakan pos yang diperuntukkan untuk semua pendapatan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin.

⁴³ Oyo sunaryo, perkembangan peradilan Islam, h.27.

⁴⁴ Teungku Muhammad hasbi ash shiddieqy, peradilan dan hukum acara Islam, (semarang: PT pustaka rizki putra, 1997), h.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setiap hak yang wajib dibagikan kepada setiap kaum muslimin, hak tersebut berlaku dalam bait al-mal.⁴⁵

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli mengenai sejarah munculnya lembaga bait al-mal. Sebagian berpendapat bahwa lembaga tersebut sudah sejak zaman nabi Muhammad saw, berdasarkan riwayat al-bukhari yang menjelaskan bahwa pada suatu ketika islam mendapatkan harta dari Bahrain, nabi menyuruh mengumpulkan harta di masjid, setelah mendapat petunjuk dari Allah swt, nabi Muhammad saw membagi-bagikan kepada para sahabat. Dari peristiwa tersebut nabi Muhammad saw telah memfungsikan masjid sebagai tempat kas negara.⁴⁶

Sebagian ahli berpendapat bahwa bait al-mal baru muncul pada saat pemerintahan abu bakar, dan abu bakar telah mempunyai sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan harta negara.⁴⁷ Pada masa abu bakar kegiatan bait al-mal masih sama dengan pemerintah nabi, pada tahap awal abu bakar memberikan uang pada setiap orang sebanyak sepuluh dirham dan tahap selanjutnya ditambah lagi hingga menjadi dua puluh dirham. Baru pada masa Umar didirikan lembaga bait al-mal atas usulan walid bin hisyam dan pada saat itu pula Umar mengangkat pejabat tinggi dan pembantu bait al-mal. Adapun syarat-syarat untuk diangkat menjadi pejabat lembaga bait al-mal yakni: merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur, dan mampu bekerja serta mampu berjihad.

2. Sumber pendapatan negara

Mengenai sumber pendapatan yang tetap dalam bait al-mal yakni terdiri dari fa'l, qanimah, kharaj, jizyah, beserta pendapatan dari hak milik umum lainnya. Sedangkan pemasukan dari hak negara diantaranya 'usyr, khumus, dan zakat. Harta yang sudah masuk dalam lembaga tersebut hanya dibelanjakan untuk keperluan umat dan negara, serta telah menjadi kebijakan negara, dan apabila

⁴⁵ Taqyuddin an-nabhani, an-nidlam al-iqtishadi fil Islam, diterjemahkan oleh moh. Maghfur wachid, membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam, (Surabaya: risalah gusti, 1996),h. 253.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, 287.

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harta tersebut cukup untuk keperluan umat maka boleh memakai harta tersebut, namun apabila tidak cukup maka negara mewajibkan pajak (dharibah) kepada seluruh umat untuk melaksanakan tuntutan pelayanan umat.⁴⁸ Pendapatan negara yang pada masa khalifah dan menyerupai pendapatan negara pada saat ini, diantaranya:

1. Zakat

Zakat adalah suatu jenis harta yang ada dalam bait al-mal, zakat merupakan rukun Islam yang merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslim, dan perolehannya bukan berasal dari non muslim dan zakat merupakan harta yang dikumpulkan pada bait al-mal baik ada kebutuhan maupun tidak.⁴⁹ Wajibnya zakat didasarkan pada firman Allah swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۚ

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)⁵⁰

Adapun pendistribusian zakat dan fa'i diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan di dalam al-qur'an surah At-taubah ayat 60 yang berbunyi bahwa:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبَنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

⁴⁸ Taqyuddi an-nabhani, membangun sistem ekonomi alternative perpektif Islam, h.254

⁴⁹ Ibid, h.256

⁵⁰ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)⁵¹

2. Jizyah

jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah swt dari orang-orang kafir kepada kaum muslim sebagai pertanda tunduknya orang kafir terhadap pemerintah Islam, dan jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat serta keperluan jihad fisabillah. Apabila orang kafir telah memberikan jizyah maka kewajiban bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka.⁵² Maka dijelaskan dalam firman Allah swt:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS.At-Taubah:29)⁵³

Jizyah diperuntukkan bagi orang kafir, namun jika telah memeluk agama islam maka tidak dipungut jizyah, dan jizyah dipungut bukan karena hartanya namun diperuntukkan bagi orang kafir. Ada beberapa ketentuan dalam pemungutan jizyah diantaranya:⁵⁴

- jizyah diperuntukkan bagi orang-orang kafir.
- Jizyah tidak diperuntukkan bagi kaum wanita, anak kecil dan orang gila.
- Jizyah tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu.

⁵¹ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, h. 197.

⁵² Abdul qadim zallum, *al-amwal fi daulah al-khilafah*, diterjemahkan oleh ahmad s, sistem keuangan di negara khilafah, (bogor: pustaka thariqul izzah, 2002),h. 57.

⁵³ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.191.

⁵⁴ Taqyuddin An-nabhani, *membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam*, h.259.

d. Jizyah tidak wajib diambil sebelum genap satu tahun.

e. Tidak ada ketentuan dalam membayar jizyah, yakni sesuai dengan ijhtihad para khalifah dan tidak melebihi kemampuan seseorang dalam membayar jizyah.

f. Jizyah gugur apabila orang tersebut telah masuk Islam

3. Kharaj

Menurut bahasa kharaj dapat diartikan dengan al-kara' (sewa) dan al-qullah (hasil), dan merupakan ha katas lahan tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir dengan cara perang maupun dengan cara perdamaian. Namun jumlah kharaj yang diambil harus sesuai dengan perhitungan kandungan tanah. Seorang khalifah diperbolehkan untuk memperkirakan kharaj sesuai dengan hal-hal yang layak diperhatikan diantaranya: berdasarkan luas tanah, berdasarkan tanamannya dan berdasarkan hasil panennya. Kharaj hanya ditentukan untuk waktu tertentu, tidak terus-menerus dan dapat berubah saat berakhir waktu tertentu sesuai dengan perkiraan kandungan tanah yang baru.⁵⁵

4. 'usyr

'Usyr merupakan hak kaum muslimin yang diperoleh dari pajak perdagangan bagi pedagang non muslim yang melakukan perdagangan di negara islam, dan orang yang bertugas memungut 'usyr disebut 'asyir.⁵⁶ Pemberlakuan pajak perdagangan dimulai pada masa Umar, ketika wilayah Islam mengalami perkembangan yang pesat dan disaat kaum muslimin melakukan perdagangan dengan negara-negara non muslim.

Pada saat kaum muslimin melakukan transaksi perdagangan di non muslim, akan dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan dan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimaksudkan untuk menambah pemasukan negara. Kadar yang dikenai untuk pajak perdagangan yakni untuk emas mencapai nilai 20 dinar dan untuk perak mencapai 200 dirham.⁵⁷

⁵⁵ Ibid, h.261

⁵⁶ Abdul qadim zallum, *al-anwal fi daulah al-khilafah*, h.105.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasaah*, h.280

C. Pengeluaran dan Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Konsep pengeluaran kekayaan negara

Prinsip utama dari pengeluaran negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan negara sendiri. Karena tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal untuk tercapainya kesejahteraan negara islam. Adapun pengeluaran negara dapat ditetapkan berdasarkan enam aspek:⁵⁸

1. Bait al-mal sebagai kas negara yang berhak terhadap terjadinya kekurangan dan untuk pelaksanaan jihad.
2. Harta yang menjadi kas tersendiri dalam bait al-mal seperti zakat, harta tersebut merupakan hak untuk dikeluarkan kepada yang berhak berdasarkan ada atau tidaknya
3. Apabila ada harta yang menjadi hak seseorang yang telah memberikan jasa, kemudian mereka meminta harta tersebut sebagai upah atas jasanya.
4. Bait al-mal sebagai pihak yang berwenang dalam pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat.
5. Pengeluaran diserahkan dengan adanya kemaslahatan dan kemanfaatan serta bukan sebagai kompensasi.
6. Pengeluaran diadakan karena keterpaksaan dengan adanya musibah yang terjadi pada rakyat.

Dana yang terhimpun dalam bait al-mal harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pengelolaan kekayaan negara yang sudah terhimpun harus dibagi dengan adil, dari pengelola kekayaan tersebut tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan uang negara dengan kehendaknya sendiri. Menurut Muhammad Iqbal, mengenai pengeluaran negara sebagaimana yang

⁵⁸ Taqyuddin an-nabhani, *membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam*, h. 264-266.

dijalankan dalam pemerintahan Islam harus mempertimbangkan kebutuhan dari negara dan warganya, yakni:⁵⁹

- a. Untuk orang-orang fakir dan miskin
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara
- c. Untuk menegakkan supremasi hukum
- d. Untuk membiayai sector pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang luas
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
- f. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- g. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau mengelola harta milik negara, dan mengaturnya dalam rangka meraih kemaslahatan bagi kaum islam dan muslimin. Pengelolaan harta kekayaan negara bukan berarti negara dalam mengelola berubah menjadi pedagang, produsen dan pengusaha. Negara adalah tetap sebagai pengatur. Oleh karena itu pengelolaan harta yang paling menonjol adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan pokoknya adalah pengaturan bukan mencari keuntungan.

Pengelolaan kekayaan negara yang terkumpul dalam bait al-mal sebenarnya tidak terbatas pada unsur-unsur yang disebutkan diatas, mengingat pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas dari sumber pendapatan negara berasal dan pengelolaan kekayaan negara tersebut harus diprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Dan tata cara pendistribusian kekayaan negara negara yang wajib didahulukan adalah yang menempati tingkat prioritas yang utama adalah untuk kemaslahatan umum kaum muslimin secara

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, h.288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, yakni dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin.

2. Peran wilayah al-hisbah dalam menyelesaikan sengketa

Dari tugas dan wewenang wilayah al-hisbah yang telah dijelaskan diatas, jelas bahwa wilayah al-hisbah berperan penting dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya apabila terjadi penyimpangan terhadap pendapatan negara dalam pengelolaannya, yang mana dari penyimpangan tersebut dapat merugikan pendapatan negara dan berimbas pada masyarakat. Tugas hisbah adalah mengantisipasi dan mencegah adanya penyimpangan tersebut, penyelesaian sengketa-sengketa yang ditangani wilayah al-hisbah tidak lain dengan yang menjadi kewajiban wilayah al-hisbah apabila melihat kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tugas dan wewenang wilayah al-hisbah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni dengan seperlunya, teguran, dan kecaman. Kegiatan yang dilakukan wilayah al-hisbah dalam menyelesaikan sengketa, yaitu diselesaikan diluar ranah peradilan, yang mana dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa. Tugas hisbah menjadi wasit diantara orang-orang yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dipraktekkan sejak pemerintahan nabi Muhammad, juga telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي ۚ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9).⁶⁰

Tradisi penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian telah dikembangkan islam sejak lama, bahkan sebelum nabi Muhammad saw mengemban tugas ke Rasullannya. Beliau pernah ditunjuk sebagai wasit dalam perselisihan internal suku quraisy tentang siapa yang berhak mengangkat kembali Hajar aswad pada posisinya semula.

Pada era pemerintahan khulafaur ar-rasyidin, terutama ketika umar bin khatab menjadi khalifah. Tradisi perwasitan dalam penyelesaian sengketa ini semakin dibudayakan dalam praktek kehidupan masyarakat, sehingga tidak hanya diterapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perniagaan saja, tetapi juga merambat dalam pertikaian dibidang sosial dan politik.⁶¹

Sama halnya dengan negara Indonesia pada saat ini, dalam kenegaraan dan pemerintahannya, dalam berbagai produk hukum positif dan huku adat yang berlaku senantiasa mengedepankan prinsip perdamaian, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik apabila upaya ini sudah ditempuh namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak yang bertikai, alternative akhirnya dengan menempuh penyelesaian menurut jalur hukum.

⁶⁰ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.316.

⁶¹ Ramdlon naming, artikel, penyelesaian sengketa dalam Islam, peran badan arbitrase syariah nasional dan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, 06 september 2008.